



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BONE
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI DARMAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**
3. NHK : **278135**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 530.000.000**

1. Tanah Seluas 725 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah Seluas 65150 m2 di KAB / KOTA BONE, WARISAN Rp. 185.000.000
3. Tanah Seluas 199 m2 di KAB / KOTA BONE, LAINNYA Rp. 30.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 328 m2/90 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 83.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, YAMAHA X RIDE SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOTOR, YAMAHA VIXION SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 24.700.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 220.697.166**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 858.397.166**



III. HUTANG

Rp. 40.066.160

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 818.331.006

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.